

## Analisis Pengaruh Jumlah Usaha Mikro Kecil terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia

Syahdhan Affiar<sup>1</sup>, Muhamad Rafli<sup>2</sup>, Andrean Putra<sup>3</sup>, Nusa Fachrial<sup>4</sup>, Cahaya Cikal<sup>5</sup>, Fitri Amalia<sup>6</sup>

<sup>1</sup> UIN Jakarta dan [syahdhan.affiar24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:syahdhan.affiar24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>2</sup> UIN Jakarta dan [muhamad.raflialfiqih24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:muhamad.raflialfiqih24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>3</sup> UIN Jakarta dan [danrean.putra24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:danrean.putra24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>4</sup> UIN Jakarta dan [muhammad.nusa24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:muhammad.nusa24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>5</sup> UIN Jakarta dan [cahaya.cikal24@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:cahaya.cikal24@mhs.uinjkt.ac.id)

<sup>6</sup> UIN Jakarta dan [fitri.amalia@uinjkt.ac.id](mailto:fitri.amalia@uinjkt.ac.id)

---

### ABSTRAK

Dalam struktur ekonomi Indonesia, keberadaan usaha mikro kecil menjadi salah satu elemen penting yang ikut memperkuat aktivitas perekonomian masyarakat melalui penciptaan peluang kerja dan perputaran ekonomi di berbagai wilayah. Kajian mengenai hubungan antara perkembangan jumlah usaha mikro kecil, tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta upah minimum provinsi dilakukan untuk melihat keterkaitannya dengan kemampuan sektor usaha mikro kecil dalam menyerap tenaga kerja di Indonesia selama periode 2020–2024. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan mengolah data sekunder berbentuk panel yang mencakup seluruh provinsi di Indonesia, dengan sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik serta berbagai publikasi resmi lainnya. Pengolahan data dilakukan melalui EViews 12 dengan beberapa proses analisis, mulai dari penggambaran karakteristik data melalui statistik deskriptif, penentuan model regresi data panel yang paling sesuai, hingga pengujian hubungan antarvariabel. Hasil analisis memperlihatkan bahwa peningkatan jumlah usaha mikro kecil mempunyai hubungan positif dan menjadi faktor yang cukup kuat dalam memperluas kesempatan kerja. Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka dan upah minimum provinsi juga bergerak dalam hubungan positif, meskipun kontribusinya terhadap perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap masih relatif terbatas. Jika dilihat secara bersamaan, seluruh faktor yang digunakan dalam model tetap memiliki keterhubungan yang berarti terhadap kondisi penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa bertambahnya jumlah usaha mikro kecil cenderung menjadi aspek yang paling berperan dalam memperbesar peluang kerja, sementara faktor ketenagakerjaan lainnya lebih berfungsi sebagai pendukung dalam perubahan kondisi pasar kerja.

**Kata Kunci:** Usaha Mikro Kecil, Penyerapan Tenaga Kerja, Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Data Panel.

---

### ABSTRACT

Within Indonesia's economic structure, the existence of micro and small enterprises has become an important element that contributes to strengthening community economic activities through job creation and regional economic development. The relationship between the growth of micro and small enterprises, the open unemployment rate (OUR), and provincial minimum wages was examined to observe their connection with the ability of the micro and small enterprise sector to absorb labor in Indonesia during the 2020–2024 period. A quantitative approach was applied by processing secondary data in the form of panel data covering all provinces in Indonesia, obtained from Statistics Indonesia and other official publications. Data processing was carried out using EViews 12 through several analytical stages, including describing data characteristics through descriptive statistics, selecting the most appropriate panel regression model, and examining the relationships among variables. The analysis indicates that the increasing number of micro and small enterprises has a positive relationship and serves as a relatively strong factor in expanding employment opportunities. Meanwhile, the open unemployment rate and provincial minimum wages also show a positive direction of association, although their contribution to explaining changes in labor absorption remains relatively limited. When observed collectively, all factors included in the model still demonstrate a meaningful connection with labor absorption conditions in the micro and small enterprise sector. This condition suggests that the expansion of micro and small enterprises tends to be the most influential aspect in increasing employment opportunities, while other labor-related factors mainly act as supporting elements in changes within the labor market.

**Keywords:** Micro and Small Enterprises, Labor Absorption, Open Unemployment Rate, Provincial Minimum Wage, Panel Data.

## PENDAHULUAN

Keberadaan usaha mikro kecil dalam sistem ekonomi Indonesia menjadi salah satu komponen yang cukup berpengaruh karena mampu mendorong perputaran kegiatan ekonomi masyarakat di berbagai wilayah (Musvira et al., 2022). Tidak hanya terkonsentrasi pada pusat kegiatan ekonomi perkotaan, perkembangan sektor ini juga menyebar hingga kawasan pedesaan sehingga menjadikannya bagian penting dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional (Widodo & Mahi, 2022). Melalui aktivitas usaha yang dijalankan, usaha mikro kecil membuka ruang bagi terbentuknya kesempatan usaha baru sekaligus memberikan alternatif sumber penghasilan bagi masyarakat. Peran tersebut menggambarkan bahwa keberadaan usaha mikro kecil mempunyai keterlibatan besar dalam proses pertumbuhan ekonomi sekaligus membantu menekan persoalan pengangguran.

Dalam beberapa periode terakhir, peningkatan jumlah usaha mikro kecil di Indonesia berjalan searah dengan semakin besarnya kemampuan sektor tersebut dalam menyediakan kesempatan kerja. Mengacu pada informasi dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, jumlah UMKM nasional pada tahun 2023 telah berada pada kisaran 66 juta unit dengan kemampuan menyerap sekitar 117 juta pekerja atau hampir 97% dari keseluruhan tenaga kerja di Indonesia (Databoks, 2024). Dari sisi kontribusi ekonomi, UMKM juga memberikan sumbangan sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto yang semakin memperlihatkan kedudukannya sebagai salah satu penggerak utama ekonomi nasional (Databoks, 2024). Sementara itu, Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa karakteristik industri mikro dan kecil sebagai sektor yang membutuhkan banyak tenaga manusia membuat keberadaannya berperan dalam memperluas peluang pekerjaan di tingkat daerah (BPS, 2024). Gambaran tersebut memperkuat pandangan bahwa bertambahnya unit usaha mikro kecil mempunyai keterkaitan dengan semakin luasnya kapasitas sektor ini dalam menampung tenaga kerja di Indonesia.

Dalam melihat perkembangan ekonomi suatu negara, jumlah tenaga kerja yang berhasil terserap sering digunakan sebagai salah satu gambaran mengenai kemampuan ekonomi dalam menyediakan ruang kerja bagi masyarakat (Winata et al., 2024). Semakin besar kesempatan kerja yang tersedia biasanya menunjukkan adanya aktivitas produksi dan kegiatan ekonomi yang terus berjalan serta membutuhkan keterlibatan tenaga manusia (Dwiatma & Nuryakin, 2025). Keadaan tersebut menjadikan penguatan sektor-sektor penyerap tenaga kerja sebagai salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi (Musvira et al., 2022). Dengan karakteristik yang cenderung fleksibel, berbasis tenaga manusia, dan mampu tumbuh di berbagai wilayah, usaha mikro kecil sering dipandang sebagai sektor yang mempunyai potensi dalam membantu mengurangi permasalahan pengangguran (Widodo & Mahi, 2022).

Peningkatan jumlah usaha mikro kecil di berbagai provinsi turut memberikan dampak terhadap dinamika ketenagakerjaan di Indonesia (Dwiatma & Nuryakin, 2025). Semakin banyak unit usaha yang beroperasi maka kebutuhan terhadap tenaga kerja juga cenderung meningkat (Winata et al., 2024). Kondisi ini terjadi karena sebagian besar usaha mikro kecil masih menggunakan tenaga kerja manusia dalam proses produksinya (Musvira et al., 2022). Selain itu, usaha mikro kecil memiliki kemampuan untuk menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang beragam sehingga membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat.

Selain jumlah usaha mikro, tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga menjadi salah satu faktor yang diduga memengaruhi dinamika penyerapan tenaga kerja di suatu wilayah. TPT mencerminkan proporsi jumlah penduduk yang belum memperoleh pekerjaan terhadap total

angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan kondisi dan tekanan dalam pasar tenaga kerja (Badan Pusat Statistik, 2023). Dalam konteks ekonomi pembangunan, tingkat pengangguran tidak hanya menunjukkan kurangnya kesempatan kerja, tetapi juga dapat mencerminkan adanya peningkatan partisipasi angkatan kerja. Menurut Todaro (2006), pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seringkali diiringi dengan meningkatnya urbanisasi dan masuknya tenaga kerja baru ke pasar kerja, sehingga dalam jangka pendek pengangguran dapat meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja.

Daerah dengan aktivitas ekonomi yang berkembang cenderung menarik lebih banyak pencari kerja, yang pada akhirnya meningkatkan jumlah angkatan kerja dan peluang kerja secara simultan (Harris & Todaro, 1970). Kondisi ini menyebabkan peningkatan TPT tidak selalu diikuti oleh penurunan tenaga kerja, melainkan dapat terjadi peningkatan keduanya akibat ketidakseimbangan sementara antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Selain itu, dalam perspektif pasar tenaga kerja, peningkatan aktivitas ekonomi daerah dapat mendorong mobilitas tenaga kerja dan memperluas peluang usaha, namun proses penyesuaian pasar kerja membutuhkan waktu sehingga tingkat pengangguran terbuka masih dapat berada pada level yang relatif tinggi (Borjas, 2016). Oleh karena itu, TPT tetap menjadi indikator penting dalam menganalisis dinamika penyerapan tenaga kerja di berbagai provinsi di Indonesia.

Faktor lain yang memengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah Upah Minimum Provinsi (UMP) (Pingkan, 2025). Kebijakan upah minimum ditetapkan pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan pekerja agar memperoleh penghasilan yang layak (Hasanah et al., 2024). Kenaikan upah minimum dapat meningkatkan biaya produksi sehingga beberapa usaha mungkin mengurangi jumlah tenaga kerja untuk menekan pengeluaran (Efendi & Barthos, 2025). Di sisi lain, peningkatan upah minimum juga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang berpotensi mendorong permintaan produk usaha mikro kecil (Rachmawati, 2025). Oleh karena itu, hubungan antara upah minimum dan penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil masih menjadi isu yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut (Pingkan, 2025).

Ketidaksamaan karakteristik ekonomi pada setiap provinsi di Indonesia turut membentuk perbedaan dalam perkembangan usaha mikro kecil serta kemampuan masing-masing wilayah dalam menyediakan kesempatan kerja. Pada beberapa daerah, pertumbuhan jumlah usaha mikro kecil berjalan cukup tinggi dan diikuti oleh besarnya tenaga kerja yang mampu terserap, sementara daerah lainnya memperlihatkan pola perkembangan yang tidak selalu sama (Winata et al., 2024). Perbedaan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek pendukung, mulai dari kondisi pertumbuhan ekonomi wilayah, kebijakan tingkat upah minimum, besarnya populasi masyarakat, hingga kapasitas penduduk dalam mengembangkan kegiatan usaha yang produktif (Eldeib et al., 2025). Oleh karena itu, pemanfaatan data yang mencakup seluruh provinsi Indonesia pada rentang tahun 2020–2024 menjadi salah satu cara untuk memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai keterkaitan antara jumlah usaha mikro kecil, tingkat pengangguran terbuka, serta upah minimum dengan kemampuan sektor usaha mikro kecil dalam menyerap tenaga kerja (Putra, 2022). Melalui kajian tersebut, kondisi ketenagakerjaan pada sektor usaha mikro kecil dapat dipahami secara lebih mendalam, terutama melihat posisinya sebagai salah satu sektor yang ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional (Anatan & Nur, 2023).

Berbagai kajian sebelumnya telah mencoba menjelaskan hubungan antara beberapa faktor ekonomi dengan kemampuan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dalam menyediakan lapangan pekerjaan di Indonesia. Dalam kajian Purba et al. (2020), peningkatan jumlah unit usaha,

aktivitas ekspor, serta pertumbuhan ekonomi mempunyai keterkaitan positif dengan bertambahnya tenaga kerja yang terserap pada sektor UMKM. Temuan dari Suhada dan Ridwan (2024) juga memperlihatkan bahwa bertambahnya aktivitas UMKM informal dapat memperbesar peluang kerja dan memberikan dorongan terhadap peningkatan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, Muslihat dan Nurjannah (2024) menjelaskan bahwa keberadaan UMKM di Jawa Barat mempunyai keterlibatan yang cukup besar dalam menampung tenaga kerja sehingga sektor tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung kondisi ketenagakerjaan daerah.

Selain perkembangan jumlah usaha, beberapa faktor ekonomi berskala makro juga sering dikaitkan dengan perubahan jumlah tenaga kerja yang terserap dalam sektor UMKM. Kajian yang dilakukan Arifin (2023) menggambarkan bahwa investasi, PDRB, UMR, serta jumlah UKM mempunyai hubungan yang berarti terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM di wilayah Pulau Sumatera. Sementara itu, Hardimanto et al. (2025) menjelaskan adanya keterkaitan antara PDB UMKM dan kebijakan upah minimum terhadap perubahan tenaga kerja pada sektor UMKM Indonesia. Pembahasan lain dari Hikmah dan Sishadiyati (2024) juga memperlihatkan bahwa aspek upah minimum, jumlah UMKM, serta investasi menjadi beberapa faktor yang berhubungan dengan kemampuan sektor usaha dalam membuka kesempatan kerja, sehingga perkembangan usaha kecil masih dianggap sebagai bagian penting dalam mengurangi tekanan pengangguran.

Walaupun pembahasan mengenai penyerapan tenaga kerja sektor UMKM telah banyak dilakukan, perbedaan hasil temuan serta keterbatasan ruang analisis masih terlihat pada sejumlah kajian sebelumnya. Beberapa kajian lebih banyak mengambil fokus pada daerah tertentu, seperti tingkat provinsi atau kabupaten, sehingga gambaran mengenai kondisi ketenagakerjaan UMKM secara nasional masih belum sepenuhnya terlihat. Melalui cakupan seluruh provinsi di Indonesia, kajian mengenai hubungan antara jumlah usaha mikro kecil, tingkat pengangguran terbuka, dan upah minimum provinsi terhadap penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil menjadi penting untuk memberikan sudut pandang yang lebih menyeluruh. Pembahasan ini juga dapat menjadi tambahan referensi akademik sekaligus memberikan gambaran bagi pihak terkait dalam mempertimbangkan strategi penguatan usaha mikro kecil serta perluasan kesempatan kerja masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Pendekatan kuantitatif dengan karakteristik asosiatif digunakan sebagai dasar analisis untuk melihat keterhubungan antara jumlah usaha mikro kecil, tingkat pengangguran terbuka (TPT), dan Upah Minimum Provinsi dengan kondisi penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil di Indonesia. Sumber informasi yang diolah berasal dari data sekunder yang dikumpulkan melalui Badan Pusat Statistik serta beberapa publikasi resmi lain yang berkaitan dengan kebutuhan analisis. Bentuk data yang digunakan berupa data panel, yaitu kombinasi antara rangkaian waktu (*time series*) dan cakupan wilayah (*cross section*) yang melibatkan seluruh provinsi di Indonesia dalam rentang periode 2020–2024. Dalam penyusunan model analisis, jumlah usaha mikro kecil ditempatkan sebagai variabel X1, Upah Minimum Provinsi sebagai variabel X2, dan Tingkat Pengangguran Terbuka sebagai variabel X3, sementara penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil digunakan sebagai variabel Y. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan mengambil data statistik yang tersedia dalam laporan tahunan dan basis data resmi dari Databoks serta BPS.

Pengolahan informasi statistik dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews 12 sebagai alat bantu estimasi. Tahapan awal pengolahan dilakukan melalui statistik deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data dari seluruh provinsi Indonesia selama tahun pengamatan 2020–2024. Melalui statistik deskriptif tersebut, variasi setiap variabel diamati berdasarkan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi. Setelah gambaran data diperoleh, proses berikutnya dilanjutkan dengan estimasi regresi data panel melalui beberapa prosedur pemilihan model. Pengujian tersebut mencakup Uji Chow dan Uji Hausman yang digunakan untuk memilih pendekatan estimasi paling sesuai antara Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM).

Bentuk persamaan regresi data panel yang diterapkan dalam analisis ini disusun sebagai berikut:

$$\ln Y = \alpha + \beta_1 \ln X_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + e$$

Pada bentuk persamaan tersebut, simbol Y menggambarkan jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro kecil sebagai variabel yang dijelaskan. Nilai  $\alpha$  menunjukkan konstanta model, sedangkan  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ , dan  $\beta_3$  menggambarkan besaran perubahan yang dihasilkan oleh masing-masing variabel penjelas. Komponen  $X_1$  menunjukkan jumlah usaha mikro kecil,  $X_2$  menggambarkan Upah Minimum Provinsi (UMP), dan  $X_3$  menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka. Pengubahan seluruh variabel ke bentuk logaritma natural (ln) dilakukan agar pola penyebaran data menjadi lebih stabil, potensi gangguan heteroskedastisitas dapat diminimalkan, serta hasil estimasi lebih mudah dijelaskan melalui pendekatan elastisitas atau perubahan dalam bentuk persentase. Adapun simbol  $e$  menunjukkan faktor lain di luar model yang berpotensi memberikan pengaruh terhadap variabel yang dianalisis.

Tahapan pengujian hubungan antarvariabel dilakukan melalui uji parsial dan uji simultan. Uji parsial atau uji t digunakan untuk melihat sejauh mana masing-masing variabel penjelas mempunyai keterkaitan terhadap perubahan variabel dependen. Penentuan hasil pengujian dilakukan melalui nilai probabilitas, dengan batas signifikansi 0,05 sebagai dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai probabilitas berada di bawah batas tersebut, maka variabel independen dianggap memiliki pengaruh yang berarti terhadap variabel dependen. Sementara itu, uji F digunakan untuk menilai hubungan seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja. Selain kedua pengujian tersebut, nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) juga digunakan untuk menggambarkan besarnya kemampuan variabel independen dalam menerangkan perubahan yang terjadi pada variabel dependen dalam model yang digunakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Hasil

Pengolahan statistik awal dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik data yang digunakan dalam analisis. Melalui statistik deskriptif, setiap variabel dapat diamati berdasarkan ukuran penyebaran dan kecenderungan datanya, seperti nilai rata-rata, nilai tengah, nilai tertinggi, nilai terendah, serta standar deviasi. Gambaran tersebut memberikan informasi awal mengenai pola data sebelum dilakukan pengujian menggunakan model regresi data panel.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel

| Variable | Mean | Median | Maximum | Minimum | Std. Dev. |
|----------|------|--------|---------|---------|-----------|
|----------|------|--------|---------|---------|-----------|

|           |          |          |          |          |          |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| LNK_PTK   | 12.00557 | 11.93117 | 13.70741 | 10.79241 | 0.721917 |
| LNK1_JUMK | 11.53299 | 11.48958 | 13.14379 | 10.25520 | 0.702742 |
| LNK2_UMP  | 1.572811 | 1.556037 | 2.393339 | 0.582216 | 0.334017 |
| LNK3_TPT  | 14.82736 | 14.84673 | 15.43826 | 14.34849 | 0.209384 |

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12, 2026.

Hasil pengolahan statistik deskriptif memperlihatkan adanya perbedaan karakteristik pada setiap variabel yang dianalisis. Pada variabel penyerapan tenaga kerja (LNK\_PTK), nilai rata-rata berada pada angka 12.00557 dengan capaian tertinggi sebesar 13.70741 dan nilai paling rendah sebesar 10.79241. Sementara itu, standar deviasi sebesar 0.721917 menggambarkan bahwa pergerakan data penyerapan tenaga kerja masih berada dalam tingkat penyebaran yang cukup stabil dan tidak memperlihatkan perbedaan yang terlalu besar dari nilai pusat datanya.

Pada variabel jumlah usaha mikro kecil (LNK1\_JUMK), nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 11.53299 dengan nilai maksimum mencapai 13.14379 serta nilai minimum sebesar 10.25520. Besaran standar deviasi sebesar 0.702742 memberikan gambaran bahwa jumlah usaha mikro kecil memiliki tingkat perbedaan yang cukup terlihat antarwilayah maupun antarperiode pengamatan, namun penyebarannya masih berada dalam kondisi yang wajar.

Variabel Upah Minimum Provinsi (LNK2\_UMP) memperlihatkan nilai rata-rata sebesar 1.572811 dengan nilai tertinggi sebesar 2.393339 dan nilai terendah sebesar 0.582216. Dengan standar deviasi sebesar 0.334017, pola persebaran data pada variabel ini cenderung lebih kecil dibandingkan beberapa variabel lainnya, sehingga perubahan nilai antarprovinsi relatif lebih seragam.

Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (LNK3\_TPT) mempunyai nilai rata-rata sebesar 14.82736, dengan nilai maksimum sebesar 15.43826 serta minimum sebesar 14.34849. Standar deviasi yang berada pada angka 0.209384 menunjukkan bahwa variasi data TPT menjadi yang paling rendah dibandingkan variabel lainnya, sehingga perbedaan nilai antarunit pengamatan relatif tidak terlalu besar.

Sebelum proses estimasi regresi data panel diterapkan, pemeriksaan hubungan antarvariabel independen dilakukan melalui pengujian multikolinearitas. Pengujian ini diperlukan untuk melihat apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antarvariabel bebas yang berpotensi mengganggu hasil estimasi model. Matriks korelasi digunakan sebagai dasar pengamatan dengan batas nilai sebesar 0,80. Ketika hubungan antarvariabel masih berada di bawah batas tersebut, maka model dapat dianggap tidak mengalami indikasi permasalahan multikolinearitas.

Tabel 2. Hasil Pengujian Multikolinearitas

| Variable  | LNK1_JUMK | LNK2_UMP  | LNK3_TPT |
|-----------|-----------|-----------|----------|
| LNK1_JUMK | 1.000000  | -0.320813 | 0.374065 |
| LNK2_UMP  | -0.320813 | 1.000000  | 0.058005 |
| LNK3_TPT  | 0.374065  | 0.058005  | 1.000000 |

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12, 2026.

Melalui hasil matriks korelasi yang diperoleh, hubungan paling besar terlihat pada variabel jumlah usaha mikro kecil (LNK1\_JUMK) dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (LNK3\_TPT), yaitu sebesar 0.374065 atau sekitar 37,40%. Hubungan antara jumlah usaha mikro kecil (LNK1\_JUMK) dan Upah Minimum Provinsi (LNK2\_UMP) menunjukkan nilai sebesar -0.320813 atau sekitar 32,08% dengan arah hubungan negatif. Sementara itu, keterkaitan paling rendah muncul pada hubungan

antara Upah Minimum Provinsi (LN<sub>X2\_UMP</sub>) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (LN<sub>X3\_TPT</sub>), yaitu sebesar 0.058005 atau sekitar 5,80%.

Seluruh nilai hubungan antarvariabel independen masih berada di bawah batas korelasi 0,80. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa setiap variabel bebas yang digunakan tidak mempunyai hubungan yang terlalu kuat satu sama lain, sehingga indikasi multikolinearitas tidak ditemukan dalam model. Oleh karena itu, seluruh variabel independen masih dapat digunakan secara bersamaan dalam proses regresi data panel tanpa menyebabkan gangguan besar terhadap hasil estimasi.

Penentuan pendekatan estimasi yang paling sesuai dalam regresi data panel dilakukan melalui beberapa proses pengujian model. Tahapan ini digunakan untuk melihat model yang mampu memberikan gambaran paling tepat terhadap karakteristik data yang digunakan. Beberapa pendekatan yang dibandingkan meliputi Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Random Effect Model (REM), dengan pengujian melalui Uji Chow serta Uji Hausman.

Tabel 3. Hasil Pemilihan Model Data Panel

| Uji     | Metode Pengujian         | Probabilitas | Kesimpulan               |
|---------|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Chow    | Cross-section F          | 0.0000       | Fixed Effect Model (FEM) |
| Chow    | Cross-section Chi-square | 0.0000       | Fixed Effect Model (FEM) |
| Hausman | Cross-section Random     | 0.0000       | Fixed Effect Model (FEM) |

*Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12, 2026.*

Melalui pengujian Chow dengan pendekatan Redundant Fixed Effects Test, nilai probabilitas Cross-section F berada pada angka 0.0000 atau lebih kecil dibandingkan tingkat signifikansi 0,05. Nilai tersebut menggambarkan bahwa penggunaan Fixed Effect Model (FEM) lebih sesuai untuk menjelaskan pola data dibandingkan dengan Common Effect Model (CEM). Perbedaan karakteristik antarunit pengamatan menjadi salah satu alasan model dengan efek tetap lebih mampu menangkap variasi yang muncul dalam data panel.

Tahapan berikutnya dilakukan melalui pengujian Hausman untuk membandingkan kesesuaian antara Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM). Nilai probabilitas Cross-section Random yang diperoleh sebesar 0.0000 atau berada di bawah batas signifikansi 0,05, sehingga pendekatan Fixed Effect Model menjadi pilihan yang lebih tepat untuk digunakan dalam proses estimasi. Pemilihan model tersebut menggambarkan bahwa setiap provinsi memiliki karakteristik tertentu yang dapat memberikan perbedaan terhadap perubahan variabel penyerapan tenaga kerja.

Dengan mempertimbangkan kedua tahapan pengujian tersebut, pendekatan Fixed Effect Model (FEM) digunakan sebagai dasar estimasi regresi data panel. Karakteristik khusus yang terdapat pada masing-masing wilayah dianggap dapat ditangkap lebih baik melalui model ini sehingga variasi data antarprovinsi dapat tergambarkan secara lebih sesuai. Untuk mengurangi kemungkinan munculnya gangguan akibat heteroskedastisitas maupun perbedaan sifat antarunit wilayah, proses estimasi juga menggunakan pendekatan White Cross-Section atau Robust Standard Error. Penggunaan pendekatan tersebut membantu menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil, konsisten, dan mampu mengurangi potensi bias pada model regresi.

Setelah model estimasi ditentukan, proses berikutnya dilakukan dengan melihat hubungan antara variabel independen dan variabel dependen melalui hasil regresi Fixed Effect Model (FEM).

Hasil estimasi tersebut memberikan gambaran mengenai arah hubungan, besarnya pengaruh, serta tingkat signifikansi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam model.

Tabel 4. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)

| Variable                        | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob   |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|--------|
| C                               | 0.873416    | 0.199666   | 4.374385    | 0.0119 |
| Jumlah Usaha Mikro Kecil_X1     | 0.900307    | 0.019548   | 46.05612    | 0.0000 |
| Upah Minimum_X2                 | 0.049828    | 0.026336   | 1.892010    | 0.1314 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka_X3 | 0.006434    | 0.004559   | 1.411117    | 0.2310 |

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12, 2026.

Melalui hasil estimasi Fixed Effect Model dengan pendekatan White Cross-Section, bentuk persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$\ln PTK = 0.8734 + 0.9003 \ln JUMK + 0.0498 \ln UMP + 0.0064 \ln TPT$$

Tabel 5. Hasil Goodness of Fit Model

| Keterangan         | Nilai    |
|--------------------|----------|
| R-squared          | 0.999978 |
| Adjusted R-squared | 0.999972 |
| F-statistic        | 170441.1 |
| Prob(F-statistic)  | 0.000000 |

Sumber: Data Diolah Menggunakan Eviews 12, 2026.

Nilai koefisien determinasi (R-squared) yang diperoleh sebesar 0.999978 atau sekitar 99,99% memberikan gambaran bahwa kombinasi variabel jumlah usaha mikro kecil, Upah Minimum Provinsi, dan Tingkat Pengangguran Terbuka mampu menjelaskan sebagian besar perubahan pada penyerapan tenaga kerja sektor usaha mikro kecil. Sisa perubahan yang tidak tergambarkan dalam model masih dapat berasal dari faktor lain di luar variabel yang digunakan. Tingginya nilai R-squared juga dapat berkaitan dengan penggunaan Fixed Effect Model yang memasukkan perbedaan karakteristik masing-masing provinsi serta penggunaan transformasi logaritma yang membantu model dalam menangkap variasi data.

Sementara itu, nilai Prob(F-statistic) sebesar 0.000000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05 menggambarkan adanya hubungan secara bersama-sama antara seluruh variabel independen dengan penyerapan tenaga kerja. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa jumlah usaha mikro kecil, tingkat upah minimum, dan tingkat pengangguran terbuka secara simultan mempunyai keterkaitan dalam menjelaskan perubahan tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro kecil di Indonesia.

## B. Pembahasan

Variabel jumlah usaha mikro kecil (JUMK) memperlihatkan nilai koefisien sebesar 0.900307 dengan probabilitas 0.0000 yang berada di bawah tingkat signifikansi 0,05. Angka tersebut menggambarkan adanya hubungan positif dan signifikan antara peningkatan jumlah usaha mikro kecil dengan kemampuan sektor tersebut dalam menyerap tenaga kerja. Melalui pendekatan model logaritma (log-log), nilai koefisien tersebut memberikan gambaran bahwa bertambahnya jumlah usaha mikro kecil sebesar 1% dapat diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja sekitar 0,90%



dengan asumsi faktor lainnya berada dalam kondisi tetap. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan usaha mikro kecil memiliki keterlibatan besar dalam memperluas kesempatan kerja masyarakat.

Besarnya peran usaha mikro kecil dalam menyediakan ruang pekerjaan berkaitan dengan karakteristik sektor ini yang lebih mengandalkan tenaga manusia dalam aktivitas produksinya. Bentuk usaha yang fleksibel, mudah dikembangkan, dan tidak selalu membutuhkan modal besar membuat sektor ini dapat berkembang pada berbagai kelompok masyarakat. Bertambahnya jumlah unit usaha juga berpotensi memperbesar kebutuhan pekerja karena setiap aktivitas produksi, pelayanan, maupun kegiatan operasional membutuhkan dukungan tenaga kerja. Dengan demikian, semakin luas perkembangan usaha mikro kecil, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru.

Pandangan tersebut memiliki kesesuaian dengan kajian Tambunan (2019) yang menjelaskan bahwa UMKM menjadi salah satu sektor dengan keterlibatan terbesar terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Kemampuan sektor tersebut dalam menyesuaikan diri pada berbagai kondisi ekonomi menjadikan UMKM sebagai bagian penting dalam mendukung perluasan kesempatan kerja sekaligus membantu mengurangi tekanan pengangguran.

Pada variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.049828 dengan probabilitas 0.1314 yang berada di atas tingkat signifikansi 0,05. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa hubungan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja bergerak secara positif, namun kontribusinya belum cukup kuat secara statistik dalam menjelaskan perubahan tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro kecil. Arah hubungan yang positif memperlihatkan adanya kecenderungan peningkatan, tetapi perubahan upah minimum belum menjadi faktor utama yang menentukan keputusan pelaku usaha dalam menambah jumlah pekerja.

Kondisi tersebut dapat dikaitkan dengan karakteristik usaha mikro kecil yang sebagian besar masih mempunyai keterbatasan dari sisi modal dan ukuran usaha. Dalam menjalankan aktivitasnya, banyak pelaku UMK lebih memilih mempertahankan jumlah tenaga kerja yang sudah tersedia dibandingkan melakukan perluasan pekerja hanya karena adanya perubahan tingkat upah. Penyesuaian jumlah pekerja pada sektor ini lebih sering mengikuti kebutuhan produksi, permintaan konsumen, serta kemampuan finansial usaha dibandingkan hanya berdasarkan perubahan kebijakan upah minimum.

Dalam pandangan teori ekonomi yang dijelaskan oleh Mankiw (2018), perubahan upah minimum dapat memberikan dampak yang berbeda. Pada satu sisi, kenaikan upah mampu meningkatkan pendapatan pekerja, tetapi pada sisi lainnya juga dapat menambah beban biaya bagi pemilik usaha. Pada lingkup usaha mikro kecil, kenaikan biaya tenaga kerja tidak selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapasitas produksi, sehingga dampaknya terhadap perluasan tenaga kerja menjadi lebih terbatas.

Dalam praktiknya, pengaruh upah minimum pada sektor usaha mikro kecil sering kali tidak menjadi faktor paling dominan dibandingkan kondisi internal usaha. Sebagian besar usaha mikro kecil masih bergerak dalam skala operasional terbatas dan banyak memanfaatkan tenaga kerja informal maupun tenaga kerja keluarga. Keadaan tersebut membuat perubahan Upah Minimum Provinsi tidak selalu menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan terkait jumlah pekerja yang digunakan. Pertimbangan seperti kestabilan permintaan pasar, kemampuan modal, dan keberlanjutan kegiatan usaha biasanya lebih diperhatikan oleh pelaku usaha dalam menentukan kebutuhan tenaga kerja.

Kondisi tersebut memiliki keterkaitan dengan pandangan Kuncoro (2002) yang menjelaskan bahwa perubahan tingkat upah minimum tidak selalu memberikan dampak yang kuat terhadap jumlah tenaga kerja, khususnya pada sektor usaha kecil dan informal. Kenaikan upah memang dapat memberikan dorongan terhadap pendapatan pekerja, tetapi dari sisi pelaku usaha peningkatan tersebut juga dapat memperbesar pengeluaran produksi sehingga belum tentu langsung meningkatkan kebutuhan terhadap tambahan tenaga kerja.

Pada variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), nilai koefisien yang diperoleh sebesar 0.006434 dengan probabilitas 0.2310 yang berada di atas batas signifikansi 0,05. Nilai tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara tingkat pengangguran terbuka dan penyerapan tenaga kerja bergerak secara positif, tetapi kekuatan hubungannya masih relatif kecil dan belum memberikan pengaruh yang berarti secara statistik. Perubahan jumlah pengangguran belum sepenuhnya mampu menjelaskan peningkatan tenaga kerja yang masuk ke dalam sektor usaha mikro kecil.

Lemahnya hubungan tersebut dapat terjadi karena meningkatnya jumlah pencari kerja tidak selalu sejalan dengan kebutuhan tenaga kerja yang tersedia dalam dunia usaha. Banyaknya angkatan kerja belum tentu langsung memperbesar jumlah pekerja yang terserap apabila keterampilan dan kemampuan yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan sektor usaha mikro kecil. Ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan permintaan pasar kerja menjadi salah satu kemungkinan yang menyebabkan tingkat pengangguran belum mampu memberikan perubahan besar terhadap penyerapan tenaga kerja.

Dalam konsep pasar tenaga kerja, Borjas (2016) menjelaskan bahwa pengangguran menggambarkan adanya kondisi ketika jumlah tenaga kerja yang tersedia belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atau permintaan tenaga kerja. Pada kondisi usaha mikro kecil, bertambahnya jumlah pencari kerja tidak secara otomatis membuat seluruh tenaga kerja tersebut dapat masuk ke dalam sektor usaha karena masih terdapat batasan kapasitas produksi, kemampuan usaha, serta kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan.

Keadaan tersebut memberikan gambaran bahwa peningkatan penyerapan tenaga kerja dalam sektor usaha mikro kecil lebih banyak berkaitan dengan perkembangan jumlah unit usaha dibandingkan perubahan tingkat pengangguran secara umum. Bertambahnya jumlah pengangguran hanya memperbesar ketersediaan tenaga kerja, tetapi peluang kerja baru tetap bergantung pada kemampuan sektor usaha dalam melakukan ekspansi dan menyediakan ruang pekerjaan bagi masyarakat.

## KESIMPULAN

Melalui pengujian regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM), terlihat bahwa jumlah usaha mikro kecil mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap peningkatan tenaga kerja yang terserap pada sektor usaha mikro kecil di Indonesia. Sementara itu, Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Pengangguran Terbuka menunjukkan arah hubungan positif, tetapi kontribusinya belum cukup besar dalam menjelaskan perubahan penyerapan tenaga kerja secara statistik. Ketika diamati secara bersama-sama, seluruh variabel yang digunakan tetap mempunyai keterkaitan terhadap perubahan jumlah tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil.

Perkembangan jumlah usaha mikro kecil terlihat menjadi aspek yang memiliki peranan paling besar dalam memperluas kesempatan kerja. Bertambahnya unit usaha memberikan dorongan terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja karena aktivitas produksi dan operasional usaha memerlukan keterlibatan sumber daya manusia. Karakter usaha mikro kecil yang mudah beradaptasi, berbasis tenaga kerja, dan mampu berkembang pada berbagai kondisi ekonomi membuat sektor ini menjadi salah satu bagian penting dalam penciptaan lapangan pekerjaan serta pengurangan tekanan dalam pasar kerja.

Faktor lain seperti upah minimum dan tingkat pengangguran terbuka tetap memiliki hubungan dengan kondisi ketenagakerjaan, namun pengaruhnya cenderung lebih terbatas dibandingkan perkembangan usaha itu sendiri. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kemampuan sektor usaha mikro kecil dalam menyerap pekerja lebih banyak dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas usaha dibandingkan faktor eksternal yang bersifat umum. Secara keseluruhan, keberadaan usaha mikro kecil masih menjadi salah satu komponen penting dalam memperkuat aktivitas ekonomi, memperbesar kesempatan kerja, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.

Ruang lingkup analisis yang digunakan masih memiliki beberapa keterbatasan dalam menggambarkan keseluruhan dinamika penyerapan tenaga kerja. Variabel yang digunakan belum mencakup seluruh faktor yang mungkin berkaitan dengan perubahan tenaga kerja, sementara penggunaan data agregat juga belum sepenuhnya menangkap kondisi yang lebih spesifik pada setiap wilayah. Perbedaan karakteristik antarprovinsi serta periode pengamatan yang terbatas membuat perubahan jangka panjang belum tergambarkan secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kajian berikutnya dapat memperluas penggunaan variabel lain yang berkaitan agar gambaran mengenai faktor penentu penyerapan tenaga kerja pada sektor usaha mikro kecil di Indonesia dapat dijelaskan secara lebih mendalam.

## REFERENSI

- Anatan, L., & Nur. (2023). Micro, small, and medium enterprises' readiness for digital transformation in Indonesia. *Economies*, 11(6), 156. <https://doi.org/10.3390/economies11060156>
- Arifin, S. (2023). Pengaruh investasi, PDRB, UMR, jumlah UKM terhadap penyerapan tenaga kerja sektor UKM Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 7(2), 166–179. <https://doi.org/10.22219/jie.v7i02.25110>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia*. <https://www.bps.go.id>
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Profil industri mikro dan kecil 2023*. <https://www.bps.go.id>
- Borjas, G. J. (2016). *Labor economics* (7th ed.). McGraw-Hill Education.
- Databoks. (2024, July 10). *Pertumbuhan jumlah UMKM Indonesia sampai 2023*. <https://databoks.katadata.co.id>
- Dwiatma, A. A., & Nuryakin, C. (2025). The effects of non-cash transactions through QRIS on MSME workers. *Jurnal Bina Praja*, 17(1), 33–41. <https://doi.org/10.21787/jbp.17.2025.33-41>
- Efendi, L., & Barthos, M. (2025). Reformulation of wage criteria for MSMEs workers. *Journal of Social Science*, 4(6), 384–394. <https://doi.org/10.57185/joss.v4i6.469>
- Eldeib, M. A. M., Maulana, M. R. P., & Nasir, M. S. (2025). Impact of MSMEs on GRDP in Central Java. *JAMPE*, 4(1), 1–16. <https://doi.org/10.12928/jampe.v4i1.11599>
- Hardimanto, Z. Z., et al. (2025). Determinan penyerapan tenaga kerja UMKM. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 5(2), 351–364. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v5i2.1110>

- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, unemployment and development. *The American Economic Review*, 60(1), 126–142.
- Hasanah, H., et al. (2024). Minimum wage policy and food security. *Agriculture & Food Security*, 13(1), 7. <https://doi.org/10.1186/s40066-023-00451-3>
- Hikmah, L. S., & Sishadiyati, S. (2024). Effects of minimum wage on employment. *JABTER*, 3(5), 543–553. <https://doi.org/10.54408/jabter.v3i5.311>
- Kuncoro, M. (2002). *Ekonomi pembangunan: Teori, masalah, dan kebijakan*. UPP AMP YKPN.
- Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning.
- Muslihat, A., & Nurjannah, F. (2024). Kontribusi UMKM pada penyerapan tenaga kerja. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(10), 314–320. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11422357>
- Musvira, M., Natsir, M., & Asizah, N. (2022). Pengaruh modal dan tenaga kerja terhadap UMKM. *Value Added*, 18(2), 65–72. <https://doi.org/10.26714/vameb.v18i2.10214>
- Pingkan, J. J. (2025). Pengaruh upah minimum terhadap PDRB. *JIEP*, 8(2), 316–325. <https://doi.org/10.20527/jiep.v8i2.2725>
- Purba, M. L., et al. (2020). Pengaruh jumlah usaha terhadap tenaga kerja UMKM. *Journal of Economics*, 2(1), 92–103. <https://doi.org/10.36655/jeb.v2i1.516>
- Putra, A. C. (2022). Pertumbuhan PDRB UMKM. *Jurnal Lemhannas*, 10(2), 134–148. <https://doi.org/10.55960/jlri.v10i2.278>
- Rachmawati, M. (2025). Legal protection of MSME wages. *IJLSSM*. <https://doi.org/10.69726/ijlssm.v2i1.85>
- Suhada, U., & Ridwan, M. (2024). UMKM informal dan tenaga kerja. *Jurnal MEA*, 8(3), 2602–2614. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i3.4791>
- Tambunan, T. T. H. (2019). *Usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Widodo, C. A., & Mahi, B. R. (2022). Productivity of MSEs in Indonesia. *JEBAV*, 25(2), 229–243. <https://doi.org/10.14414/jebav.v25i2.3136>
- Winata, J. A., et al. (2024). Industri mikro dan ekonomi Indonesia. *RAGAM*, 3(1), 83–96. <https://doi.org/10.20527/ragam.v3i1.12799>